

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan antar negara yang bersifat bilateral maupun multilateral dalam berbagai bidang tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara. Setiap negara tidak bisa lepas dari hubungan internasional, perlunya setiap negara menjalin sebuah hubungan internasional guna meningkatkan hubungan kerjasama serta membangun solidaritas antar negara yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan nasional. Hubungan internasional itu sendiri terjadi karena adanya faktor yang dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa semua negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan selalu membutuhkan negara lain, karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai penggunaan kepentingan yang sama atau bertentangan yang diwujudkan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan (Holsti, 1987). Maka dari itu, setiap negara penting untuk menjalin kerjasama.

Konsep kerjasama yang awalnya terdiri dari aliansi dalam persiapan perang, telah berubah dari ranah non-militer menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Peningkatan kerjasama memiliki efek samping pengalihan kerjasama ke bidang lain untuk menciptakan kondisi saling ketergantungan atau *interdependence* (Hadiwinata, 2017). Negara-negara akan memperluas lingkup kerjasama di berbagai sektor. Salah satu sektor yang dikerjakasikan antar negara yaitu sektor ekonomi dan perdagangan, yang merupakan isu penting yang menjadi perhatian utama dalam hubungan internasional kontemporer. Ekonomi dan perdagangan dunia telah menjadi isu yang cenderung kompleks dan menarik karena berdampak terhadap kehidupan umat manusia di seluruh dunia, baik bagi masyarakat di negara maju maupun bagi masyarakat di negara-negara berkembang. Oleh karena itu untuk menunjang perekonomian suatu negara, setiap negara

membutuhkan bantuan dari negara lain. Adanya suatu bantuan dari negara lain tersebut, maka terjadilah suatu kerja sama ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral. Melalui kerjasama ekonomi, negara yang memiliki kekurangan baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya akan dapat terpenuhi.

Indonesia adalah salah satu negara yang juga membangun kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mitra, salah satunya kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan. Kerjasama ekonomi tersebut dapat terjalin karena adanya hubungan diplomatik antara kedua negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan pertama kali terjalin pada tahun 1966. Hubungan diplomatik tingkat kedutaan besar resmi dibuka pada tahun 1973 (KBRI Seoul, 2015). Hubungan keduanya semakin kuat dan mendalam di tengah perubahan regional dan global. Disusul dengan dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1973, hubungan tersebut diperluas ke berbagai bidang termasuk ke dalam bidang perekonomian yang berfokus pada pembangunan ekonomi, teknologi informasi, tenaga kerja asing, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, usaha kecil dan menengah serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Korea Selatan dipilih sebagai negara mitra untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi karena Indonesia membutuhkan modal atau investasi dari Korea Selatan dalam mengembangkan perekonomiannya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi asal Korea Selatan sampai dengan September 2020 berada pada peringkat ketujuh dengan total investasi sebesar US\$ 683 juta. Sebanyak 70% realisasi investasi Korea Selatan tersebut pada sektor investasi listrik, gas air (US\$ 228,4 juta); industri kimia dan farmasi (US\$148,4 juta), industri tekstil (US\$ 60,8 juta), industri barang kulit dan alas kaki (US\$50,9 juta) dan industri makanan (US\$ 14,8 juta). Saat ini ada sekitar dua ribu (2.000) perusahaan Korea Selatan dari berbagai sektor yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia (Machmudi, 2020). Sebaliknya Korea Selatan sangat membutuhkan peranan Indonesia dalam memenuhi aspek sumber daya alam dan mineral, serta

pasar Indonesia yang sangat besar.

Selain itu, dipilihnya Korea Selatan sebagai negara mitra untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi karena mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara semakin kuat terutama dalam hal perdagangan dan penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Hubungan baik tersebut ditandai adanya pembentukan *Chiang Mai Initiative* (CMI) setelah dilanda krisis keuangan Asia pada tahun 1997 bersama-sama dengan China, Jepang dan negara-negara anggota ASEAN (negara ASEAN *Plus Three* atau APT). Terbentuknya CMI telah mengintegrasikan perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan lebih jauh.

Hubungan bilateral kedua negara meningkat tajam setelah kedua Pemimpin Negara menandatangani *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* pada tanggal 4 April 2006, di Jakarta dalam kunjungan Presiden Roh Moo-Hyun ke Indonesia pada bulan Desember. Kerjasama ini membuat Indonesia dan Korea Selatan menjadi patner yang lebih dekat untuk memajukan kedua negara tersebut khususnya dalam bidang perekonomian.

Dalam pilar kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan secara nyata membentuk *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC) pada tahun 2007. Pada tahun 2010 JTF-EC kemudian direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM). Pembaruan tersebut dilakukan karena pemerintah Indonesia dan Korea Selatan ingin merealisasikan kerjasama secara nyata dan konkrit melalui program MP3EI. Selama pelaksanaan WLTFM, pada tanggal 25 September 2013 di Seoul Korea Selatan, menghasilkan sembilan perencanaan utama kerjasama ekonomi, yaitu : kelompok kerja perdagangan dan investasi, kelompok kerja industri, kelompok kerja energi dan sumber daya mineral, kelompok kerja konstruksi dan infrastuktur, kelompok kerjasama lingkungan, kelompok kerja pertanian, kehutanan, dan perikanan, kelompok kerja industri pertahanan, kelompok kerja pembiayaan pembangunan, dan kelompok kerja mobil ramah lingkungan.

Dari sembilan kelompok kerja tersebut, tiga diantaranya telah terealisasi. Dua kelompok kerja telah berjalan dengan baik, yaitu pada kelompok kerja industri. Antara Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama industri tekstil dengan tenaga ahli dari Korea. Pada kelompok kerja energi dan sumber daya mineral, Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama dalam kerangka *Indonesia – Korea Energy Forum* (IKEF). Namun, pada kelompok kerja perdagangan dan lima tahun terakhir, neraca perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011-2015. Jumlah ekspor Indonesia ke Korea Selatan mengalami penurunan sebesar US\$ 8,799,058 dan jumlah impor Indonesia dari Korea Selatan mengalami penurunan sebesar US\$ 4,572,544. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan yang mengalami penurunan adalah bahan bakar mineral mentah, karet, peralatan mesin listrik, bijih dan terak. Sejalan dengan itu, jumlah ekspor Korea Selatan ke Indonesia juga mengalami penurunan sebesar US\$ 5,689,259 dan jumlah impor Korea Selatan dari Indonesia menurun sebesar US\$ 8,363,814. Komoditi utama Korea Selatan yang mengalami penurunan adalah produk penyulingan bahan bakar mineral, besi dan baja, peralatan mesin listrik, dan mesin peralatan mekanik.

Penurunan perdagangan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan, ditanggapi oleh pemerintah kedua negara dengan membentuk IK-CEPA. Hal ini menurut Stephen D. Krasner adalah sebagai pola perilaku yang berdasarkan pada variabel kausal dasar *Habit* dan *Custom*, yaitu kondisi nyata dan kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku yang didasari oleh sifat egois yang mengutamakan kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam membangun energi alternatif terbarukan yang mengurangi perdagangan migas dengan Indonesia, sedangkan produk migas adalah salah satu komoditas utama perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan, kemudian memunculkan dilema atau permasalahan bersama yaitu terjadinya penurunan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Dilema tersebut kemudian diakhiri dengan pencarian solusi sebagai kesamaan harapan akan penyelesaian permasalahan. Penyelesaian permasalahan pada penurunan perdagangan bilateral Indonesia dan Korea adalah

dengan menyepakati pembentukan IK-CEPA.

Untuk menindaklanjuti kerjasama ini maka pada tahun 2011 pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk mulai membentuk *Joint Study Group* (JSG) untuk menjajaki kerjasama dan melakukan studi kelayakan bersama untuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Kerjasama ekonomi dapat dibentuk setelah kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan mendeklarasikan bersama penyelesaian perundingan dalam *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Dengan adanya kesepakatan IK-CEPA negara berharap dapat memperluas cakupan barang bebas bea masuk dan kedua negara dapat memainkan peran penting dan berguna.

Beberapa putaran perundingan sudah dilakukan dari tahun 2012 dan pada tahun 2014 putaran perundingan berhenti dikarenakan adanya pergantian kepala negara pada tahun 2014. Akibatnya para negosiator Indonesia untuk IK-CEPA tidak memperoleh kepastian kebijakan ketika berkonsultasi ke kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, terhentinya perundingan kedua negara dikarenakan masih alotnya pembahasan mengenai perdagangan jasa. Meskipun perundingan IK-CEPA terhenti, namun kedua negara masih optimis untuk mencapai kesepakatan. Optimisme ini didasarkan adanya deklarasi *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* tahun 2014.

Selanjutnya tahun 2019 putaran perundingan dimulai lagi. Kedua negara sepakat mereaktivasi perundingan pada tahun 2018 dan kemudian berhasil menyelesaikan substansi perundingan. Reaktivasi hingga finalisasi IK-CEPA menjadi persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dilakukan selama delapan bulan (Februari sampai dengan Oktober 2019). Akhirnya kesepakatan IK-CEPA sepakat ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Korea Selatan.

Putaran perundingan IK-CEPA sampai dengan disepakati kedua negara mengalami dinamika. Dinamika perjalanan perundingan IK-CEPA ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan mengalami pasang surut dan banyak kendala

yang dihadapi, sehingga sempat berhenti dan dilanjutkan lagi serta akhirnya rampung pada tahun 2020. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian ini. Penelitian ingin menganalisis bagaimana strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi kendala selama proses perundingan IK-CEPA.

Sehubungan dengan proses perundingan dalam kerjasama ekonomi, telah ada beberapa karya yang membahas mengenai hal ini, seperti karya yang ditulis oleh Rebeca Pratiwi Indonesia Rompas (2019) yang melihat bahwa negosiasi yang dilakukan pada tahun 2012 hingga 2014 dihentikan sementara oleh kedua pihak, *package deal* yaitu belum tercapainya sinkronisasi antara tuntutan dan penawaran (*offer and request*) dari kedua pihak. Adanya isu-isu yang belum mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan di dalam *draft text* perjanjian IK-CEPA. Sehingga IK-CEPA belum bisa digunakan sebagai strategi dan solusi untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Untuk itu kemudian pada tahun 2017 Indonesia dan Korea Selatan menerapkan kebijakan baru yaitu *Special Strategic Partnership*. Kebijakan tersebut akan mendorong percepatan peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia dan membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Kebijakan tersebut juga dapat memberi dampak luas karena mencerminkan terbangunnya sikap saling percaya antara dua negara.

Sementara itu, Adrini Pujayanti (2019) melihat kerjasama IK-CEPA dari tinjauan potensi dan tantangannya. Indonesia dan Korea Selatan berupaya memperkuat kerjasama terutama didasarkan pada prinsip peningkatan perekonomian kedua negara. Walaupun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, namun kedua negara berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi dari kerjasama yang merupakan implementasi dari IK-CEPA. Upaya tersebut berpotensi besar untuk dilaksanakan atau diimplementasikan karena Indonesia merupakan negara ASEAN satu-satunya yang sudah menyetujui CEPA dengan Korea Selatan.

Selain itu terdapat karya yang melihat diplomasi ekonomi pada perundingan IK-CEPA. Dalam hal ini karya dari Fery Fernando Samosir (2012) melihat

diplomasi ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing negara untuk saling melengkapi satu negara dengan yang lain. Indonesia memiliki beberapa keunggulan antara lain dalam hal sumber daya alam yang sangat banyak, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak dan murah, dan pasar yang luas. Kondisi tersebut dapat melengkapi atau mengisi hal-hal yang tidak dimiliki Korea Selatan. Sementara itu Korea Selatan memiliki modal yang cukup dan teknologi memadai yang dibutuhkan Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Bidang yang dikerjsamakan antara kedua negara yaitu bidang perdagangan dan investasi. Kedua negara menjalin kerjasama ekspor dan impor dalam mengembangkan bidang perdagangan terutama pada sektor minyak dan gas. Selain itu Korea Selatan menanamkan modal di Indonesia dalam mengimplementasikan kerjasama bidang investasi.

Pada sisi lain Achmad Ismail dan Darynaufal Mulyaman (2018) melihat diplomasi ekonomi pada perundingan IK-CEPA melalui pendekatan behavioralisme, yang mana perilaku aktor dan interaksinya dapat dijelaskan berdasarkan data statistik serta pernyataan resmi pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Hasil karya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan perdagangan serta produk Indonesia yang belum memenuhi standarisasi Korea Selatan terwujud dari pola interaksi antara aktor-aktor dalam IK-CEPA. Perbedaan aktor dalam menyikapi isu IK-CEPA yang bertolak belakang berbanding lurus dengan penurunan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Oleh karena itu, hal ini menjadi jawaban kongkrit dari bagaimana sikap Indonesia dalam perundingan IK-CEPA. Perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi pendorong utama dari sikap yang menyebabkan perundingan IK-CEPA mengalami kendala. Maka dari itu, dalam konteks ini, tindakan Indonesia terbilang *defensive* pada negosiasi IK-CEPA.

Berdasarkan karya-karya atau penelitian di atas terlihat bahwa penelitian yang membahas tentang dinamika perundingan kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan telah dilihat dari sisi *package deal*, tantangan dan potensi, keunggulan kedua belah pihak/negara serta pendekatan behavioralisme.

Namun pembahasan dari sisi proses dan kendala diplomasi ekonomi belum dibahas oleh karya-karya tersebut. Dengan demikian perbedaan keempat karya atau penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan pada proses dan kendala diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan mulai dari awal diplomasi sampai dengan disepakatinya perundingan IK-CEPA dan kendala-kendala dalam diplomasi ekonomi sehingga perundingan IK-CEPA terhenti selama lima tahun. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi, negosiasi dan kerjasama ekonomi internasional. Penelitian ini fokus pada upaya negosiasi dari pihak pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi untuk mencapai kesepakatan IK-CEPA. Berdasarkan konsep dan fokus tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini membahas dinamika proses berjalannya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam perundingan IK-CEPA dan kendala-kendalanya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, terlihat bahwa proses diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan diharapkan dapat berjalan lancar dan disepakai dalam waktu yang tidak lama, namun kenyataannya diplomasi ekonomi tersebut mengalami kendala dan terhenti sehingga membutuhkan waktu lama (delapan tahun) sampai dengan disepakatinya perjanjian IK-CEPA. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan (*gap*) antara kondisi yang seharusnya (*das solen*) yaitu diplomasi ekonomi berjalan lancar dan tidak mengalami kendala dengan kondisi nyata (*das sein*) yaitu diplomasi ekonomi mengalami kendala sehingga mengalami keterhentian. Adanya *gap* ini merupakan permasalahan yang menarik dan urgen atau perlu untuk diteliti. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam Perundingan *Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* tahun 2014-2020?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan secara praktis dan teoritis penelitian ini sebagai berikut:

a. Tujuan Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses dan kendala diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam perundingan kerjasama IK-CEPA sampai dengan disepakatinya kerjasama tersebut.

b. Tujuan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin agar penelitian tentang perundingan kerjasama IK-CEPA yang dilakukan lebih mendalam serta dapat dikaji dari perspektif diplomasi ekonomi.

I.4 Manfaat Penelitian

diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis dan sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan *stakeholder* terkait (pemerintah dan pelaku perdagangan), antara lain:

- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kontribusi terhadap perkembangan penelitian tentang diplomasi ekonomi di masa mendatang.
- 2) Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi tentang diplomasi ekonomi, khususnya diplomasi ekonomi dalam perundingan IK-CEPA.
- 3) Bagi pemerintah Indonesia (Kementerian Perdagangan RI), diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan diplomasi ekonomi guna menjalin kerjasama ekonomi dengan negara mitra.
- 4) Bagi para pelaku perdagangan, diharapkan dapat memberikan

masukannya dalam melakukan perdagangan atau ekspor dan impor Indonesia dengan negara mitra agar menjadi lebih optimal.

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan antara lain:

- 1) Sumbangan pemikiran bagi perkembangan konsep diplomasi, khususnya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara mitra.
- 2) Kontribusi dalam pengembangan ilmu dan sebagai media referensi mengenai perundingan IK-CEPA bagi peneliti selanjutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri atas tiga bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang permasalahan, uraian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang permasalahan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tentang adanya penyimpangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yaitu bahwa proses diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan diharapkan dapat berjalan lancar dan disepakati dalam waktu yang tidak lama, namun kenyataannya diplomasi ekonomi tersebut mengalami kendala dan terhenti sehingga membutuhkan waktu lama (delapan tahun) sampai dengan disepakati. Pada bagian rumusan masalah disampaikan pertanyaan penelitian mengenai proses dan kendala diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam perundingan kerjasama IK-CEPA sampai dengan disepakatinya kerjasama tersebut. Pada bagian tujuan penelitian disampaikan mengenai tujuan secara praktis dan teoritis penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Pada bagian manfaat

penelitian disampaikan mengenai manfaat praktis dan akademis bagi stakeholder terkait dan dalam pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya tentang diplomasi ekonomi. Pada bagian sistematika disampaikan mengenai urutan penulisan proposal skripsi yang terdiri dari bab I, bab II dan bab III.

- b. Bab II Tinjauan Pustaka; berisi tentang konsep dan teori penelitian serta kerangka pemikiran. Pada bagian konsep dan teori penelitian diuraikan mengenai berbagai pendapat ahli mengenai konsep diplomasi ekonomi, negosiasi dan kerjasama ekonomi internasional. Pada bagian kerangka pemikiran diuraikan dan digambarkan dalam bentuk bagan mengenai gambaran umum dari alur berpikir penelitian ini mulai dari rumusan masalah hingga menghasilkan jawaban dan temuan penelitian.
- c. Bab III Metode Penelitian; berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu. Pada bagian objek penelitian disampaikan mengenai objek yang menjadi perhatian dan sasaran dalam penelitian ini yaitu diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam perundingan IK-CEPA. Pada bagian jenis penelitian disampaikan mengenai metode dan desain/model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan desain fenomenologi. Pada bagian teknik pengumpulan data disampaikan mengenai teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara (*interview*) terhadap para informan dan studi dokumentasi (*documentation study*) terhadap dokumen-dokumen terkait dengan perundingan IK-CEPA. Pada bagian sumber data disampaikan mengenai subyek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada bagian teknik analisis data disampaikan mengenai teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu teknik model interaktif yang meliputi: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion verification*). Pada

bagian tabel rencana waktu disampaikan mengenai rencana waktu berikut kegiatan penelitian yaitu mulai dari pembuatan draft usulan penelitian sampai dengan penyerahan skripsi yang dilakukan selama 5 (lima) bulan.

- d. BAB IV Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Ik-Cepa; berisi tentang latar belakang pembentukan IK-CEPA, dinamika perundingan IK-CEPA, hambatan perundingan IK-CEPA: perspektif Indonesia, dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam proses perundingan IK-CEPA tahun 2014-2020. Pada bagian latar belakang pembentukan IK-CEPA disampaikan mengenai pembentukan IK-CEPA yang dilatarbelakangi adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan negara mitra, menciptakan akses pasar produk-produk Indonesia ke Korea Selatan dan investasi dari Korea Selatan ke Indonesia serta untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pada bagian dinamika perundingan IK-CEPA disampaikan mengenai dinamika dalam proses perundingan IK-CEPA mulai putaran pertama sampai dengan putaran ketujuh dan klausul investasi masih menjadi *pending issues*. Pada bagian hambatan perundingan IK-CEPA: perspektif Indonesia disampaikan mengenai perundingan IK-CEPA sampai dengan putaran ketujuh mengalami kendala yang disebabkan belum disepakatinya tentang bea masuk bagi produk-produk Indonesia dan adanya pergantian presiden kedua negara pada tahun 2013 dan 2014 sehingga terhenti selama lima tahun. Pada bagian strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam proses perundingan IK-CEPA tahun 2014-2020 disampaikan mengenai upaya pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi untuk mencapai kesepakatan setelah peninjauan untuk melanjutkan perundingan IK-CEPA disepakati pemerintah kedua negara pada tahun 2018 yang akhirnya perundingan disepakati pada tanggal 18 Desember 2020.
- e. BAB V Kesimpulan dan Saran; berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menyepakati pembentukan IK-CEPA, walaupun dalam

proses perundingannya mengalami dinamika dan sempat terhenti. Pembentukan IK-CEPA dilatarbelakangi adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan negara mitra, menciptakan akses pasar produk-produk Indonesia ke Korea Selatan dan investasi dari Korea Selatan ke Indonesia serta untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam proses perundingan IK-CEPA mengalami dinamika mulai putaran pertama sampai dengan putaran ketujuh dan klausul investasi masih menjadi *pending issues*. Perundingan IK-CEPA sampai dengan putaran ketujuh mengalami kendala yang disebabkan belum disepakatinya tentang bea masuk bagi produk-produk Indonesia dan adanya pergantian presiden kedua negara pada tahun 2013 dan 2014 sehingga terhenti selama lima tahun. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi untuk mencapai kesepakatan setelah penjajakan untuk melanjutkan perundingan IK-CEPA disepakati pemerintah kedua negara pada tahun 2018 yang akhirnya perundingan disepakati pada tanggal 18 Desember 2020. Pada bagian saran disampaikan saran teoritis maupun saran praktis. Pada bagian saran teoritis disampaikan saran kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan diplomasi ekonomi dan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam penelitiannya. Pada bagian saran praktis disampaikan mengenai saran kepada pemerintah Indonesia agar mempertahankan strategi dalam melakukan diplomasi ekonomi dalam rangka keberhasilan dalam negosiasi dan disepakatinya kerjasama ekonomi seperti IK-CEPA.